

BHY KHS -01-04

Pengaruh Lingkungan Global Terhadap Pembangunan Nasional Dan Sistem Nilai Bangsa Indonesia

Oleh DR. Teguh Soedarsono *)

Pengantar

Perkembangan lingkungan global tidak dapat lagi diabaikan pengaruhnya terhadap tata kehidupan nasional, karena arus globalisasi yang demikian deras mau tidak mau harus disambut dengan sikap kearifan dari semua pihak agar tidak menjurus menjadi bangsa yang kerdil dan tertutup. Sebaliknya bila hal tersebut akan dipenuhi hendaknya hal itu tidak menjadi pendorong minat untuk menghapus atau melunturkan jatidiri atau kepribadian bangsa. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan pembahasan terhadap proses Pembangunan Nasional dan upaya mempertahankan Sistem Nilai Bangsa dengan memperhatikan lembaga kondisi perkembangan lingkungan strategik pada skala global, regional, maupun nasional.

Pengaruh lingkungan global secara langsung maupun tidak langsung mempunyai daya penetrasi yang kuat ke seluruh penjuru dunia (*mondial*) dan bahkan tidak jarang mengandung berbagai sistem nilai baru yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat. Penetrasi tersebut akan menjadi semakin kuat yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu, terutama teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi karena dengan hal itu tidak saja memberikan dorongan yang kuat bagi proses penanaman nilai-nilai baru tetapi juga memberikan energi dalam mengatasi berbagai kelangkaan (*scarcity*) sehubungan dengan permintaan (*demand*)

dunia yang semakin meningkat karena tuntutan hidup manusia yang semakin meningkat sehubungan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Perkembangan teknologi global tersebut telah menjadikan dunia menjadi semakin kecil (*global village*), yang menjadikan interaksi serta ketergantungan antar bangsa maupun negara menjadi semakin meningkat.

Alvin Toffler (*The Third Wave, 1980*), dan John Naisbitt & Patricia Aburdene (*Megatrends 2000, 1990*) dalam pengamatannya terhadap hal tersebut menangkap pesan penting dalam perkembangan global, yaitu dimana dalam proses perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan global tersebut telah terjadi suatu pergeseran nilai masyarakat yang semula berbasis pertanian mengarah pada tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya industri atau modern. Dinyatakan lebih lanjut bahwa pada saat ini telah terbentuk gelombang-gelombang perubahan tata nilai dan pola perilaku masyarakat dengan tingkat kemajuan serta tahapan Pembangunan Nasional, yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut pada dasarnya ditentukan dari pengalaman negara yang bersangkutan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini pengalaman serta keberhasilan Pembangunan Nasional suatu negara tidak dapat begitu saja ditiru dan diterapkan di negara lain, karena pengaruh global dengan berbagai sistem nilai baru memberikan pengaruh terhadap proses dan program Pembangunan Nasional dari negara yang bersangkutan, sehingga untuk hal ini perlu

*) Penulis adalah Kepala PPI TK - PTIK, Jakarta

diterapkan berbagai langkah kebijaksanaan yang tepat dalam proses Pembangunan Nasional di masing-masing negara.

Perkembangan Global

Di dalam proses globalisasi terhadap minimal empat kecenderungan perubahan sistem nilai, yaitu sebagai berikut :

Pertama, perkembangan yang ditandai dengan terjadinya perubahan lingkup atau tujuan kerja sama multilateral, di mana pada mulanya kerja sama internasional ditujukan untuk membentuk forum konsultasi (*non-binding*) namun untuk saat ini tujuan kerja sama justru bersifat kohesif atau mengikat (*binding*). Dengan perubahan bentuk dan atau pola kerja sama tersebut menjadikan negara berkembang menghadapi kesulitan dalam berbagai hal. Dari keadaan tersebut terlihat negara-negara maju yang sudah lebih siap akan mempunyai kekuatan dan atau posisi tawar-menawar (*bargaining power*) yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang sedang dan baru berkembang.

Kedua, perkembangan paradigma dalam proses dan pola Pembangunan Nasional, yang pada mulanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan konvensional yang bersifat jangka pendek dan sedang (*short term*), mengarah pada pendekatan yang bersifat berkelanjutan (*sustainable development*) yang melingkup proses antar generasi (*long term*). Dalam hal ini Pembangunan secara berkelanjutan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi daya dukung lingkungan sekitarnya (*Environmental Carrying Capacity*) yang dikaitkan juga dengan kepentingan pembangunan oleh generasi yang akan datang.

Ketiga, ekonomi politik dunia yang semula menganut sistem ekonomi sentralistik untuk saat ini cenderung menjadi sistem ekonomi yang mendasarkan pada kepentingan pasar. Hal tersebut ditampakkkan pada sistem perekonomian negara-negara

industri, seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis dan Jepang. Keadaan ini memberikan efek pada proses penyiapan produk impor.

Keempat, perkembangan yang ditandai dengan perubahan para pelaku atau pemrakarsa pembangunan yang semula didominasi oleh kalangan birokrat dan instansi/lembaga dan Aparat Pemerintah, sekarang pemrakarsa dan pelaku pembangunan justru banyak didominasi oleh para interpreneur dari berbagai organisasi atau lembaga non pemerintah, dan bahkan hal itu banyak dilakukan oleh kalangan swasta. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi munculnya para pemain baru yang tidak hanya memikirkan kepentingan publik saja namun juga memikirkan kepentingan organisasi, golongan, dan hak pribadinya masing-masing.

Menangkap berbagai perubahan dan perkembangan kondisi lingkungan global tersebut, maka kerja sama formal antara pemerintah negara yang dilakukan melalui jalur lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menentukan enam agenda global yang perlu diprioritaskan dalam Pembangunan Nasional di setiap negara yaitu pembangunan untuk mewujudkan penegakan perdamaian (*peace making*), perlucutan senjata (*disarmament*), perdagangan dan pembangunan (*trade and development*), manajemen sumber daya global (*global resource management*), sosial dan kemanusiaan (*social and humanitarian*) dan pemberlakuan aspek hukum (*legal aspects*). Di sisi lain melalui forum kerja sama di luar lembaga PBB telah dikembangkan suatu proses kerja sama yang menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dengan konsep mengimplementasikan nilai-nilai universal seperti penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, dan demokratisasi.

Dalam perkembangannya lebih lanjut

telah terjadi suatu gejolak atau aktivitas tidak wajar yang bersifat global (*global paradox*) di mana aktivitas tersebut dapat mengubah wajah dunia mendatang, antara lain seperti aktivitas di bidang turisme dan tribalisme, di mana dari kedua aktivitas tersebut memberikan pesan dominan pada masyarakat lokal namun dalam realitasnya yang lebih luas mampu mendorong pengembangan keadaan yang sangat luas.

Oleh karena itu tidak heran bila terhadap makna globalisasi terhadap berbagai pandangan yang dikaitkan dengan kerangka antisipasinya di antaranya adalah konsep atau pandangan dari John Naisbitt (*Megatrends 2000, 1990*) dan Roeslan Abdulgani (Kebangkitan Nasional II Merupakan Pangkal Pengaruh Negatif Arus Globalisasi, 1992), di mana dari keduanya memiliki pandangan sendiri-sendiri yang berbeda tentang pemaknaan globalisasi tersebut. Hal itu memang sangat beralasan, karena yang satu berasal dari kehidupan masyarakat yang sedang maju sedangkan yang satunya berasal dari kehidupan masyarakat yang sedang berkembang.

Naisbitt dalam pandangannya menyatakan bahwa proses globalisasi sebenarnya merupakan rangkaian langkah atau upaya untuk memberikan penyadaran semua bangsa untuk mampu membentuk suatu ruang hidup yang di dalamnya dapat berinteraksi semua pihak secara bersama dalam globus atau dunia tanpa dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses alamiah. Melalui pendapatnya tersebut Naisbitt mencoba menyampaikan pemikirannya bahwa makna globalisasi sebenarnya mempunyai tujuan untuk mensejajarkan atau menyetarakan berbagai keadaan dan atau martabat hidup bangsa-bangsa di dunia ke suatu peradaban dan atau tata kehidupan yang setara. Sedangkan menurut Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa proses globalisasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari proses ekspansionisme dari masyarakat

negara-negara Barat dengan cara memanfaatkan hubungan kehidupannya kepada negara-negara yang sudah lebih maju. Pendapat ini memang sangat kontradiktif, namun dari pendapat kedua tokoh ini dapat ditarik berbagai alternatif pilihan untuk melakukan antisipasi tindak lanjut proses Pembangunan Nasional di masing-masing negara yang bersangkutan.

Memang untuk saat ini masih sulit mengatakan pendapat mana yang paling benar, karena untuk membuktikan hal tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang. Walaupun demikian negara-negara Amerika Latin yang mengalami krisis pada tahun 80-an seperti Argentina, Brazil dan Chili telah mampu membuktikan bahwa proses Pembangunan Nasional memang sangat bergantung kepada negara-negara besar di sekitarnya terutama negara Amerika Serikat. Hal ini membuktikan bahwa pendapat Roeslan Abdulgani lebih benar untuk kasus Amerika Latin, namun untuk negara-negara lain seperti Indonesia masih perlu dilihat dan dibandingkan secara lebih cermat lagi.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Nasional Dan Sistem Nilai Kehidupan Bangsa Di Indonesia

Perkembangan nilai-nilai ekstrinsik yang terkandung dalam proses globalisasi telah memberikan pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan nasional di Indonesia. Hal ini antara lain dibuktikan dengan berbagai keadaan sebagai berikut :

Pertama, kondisi meningkatnya persaingan global telah mendorong peningkatan daya saing nasional dari setiap negara termasuk negara Indonesia. Menurut pendapat Michael Porter, 1986 dan Dong Sung Cho, 1997 dinyatakan bahwa daya saing merupakan faktor utama untuk mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu kuantitas maupun kualitas sumber daya sering ditempatkan sebagai prioritas utama dalam Pembangunan

Nasional.

Kedua, dominasi ekonomi dari negara-negara maju terasa sangat menonjol, dalam hal ini kelebihan atau kelebihan yang dimiliki negara-negara tersebut sering digunakan untuk dijadikan alat politik untuk upayanya mencapai kepentingan dan atau tujuan nasionalnya. Mengantisipasi hal tersebut maka Pembangunan Nasional yang secara optimal sering diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi hendaknya dapat diarahkan pada sebesar mungkin untuk mewujudkan fundamen ekonomi nasional yang lebih baik dan kokoh. Dari keadaan tersebut diharapkan dapat dikurangi ketergantungan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dari negara-negara maju. Sehubungan hal tersebut kiranya implementasi Otonomi Daerah hendaknya dapat diarahkan pada berbagai upaya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah untuk mendukung Pembangunan Nasional.

Ketiga, pengagungan nilai-nilai universal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat global saat ini seperti hak-hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, dan demokratisasi perlu diimplementasikan dalam tatanan maupun proses Pembangunan Nasional. Namun hal ini hendaknya selaras dengan sistem nilai kehidupan bangsa. Untuk hal ini kiranya dalam era reformasi yang dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia saat ini harus diartikan sebagai suatu keadaan untuk membentuk kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Dari salah satu survey yang dilakukan oleh pihak Bank Dunia (1989) dapat dibuktikan bahwa negara-negara yang proses demokratisasinya berjalan baik maka dipastikan bahwa Golongan Kelas Menengah dan kehidupan masyarakatnya pasti baik, tetapi sebaliknya negara-negara yang kehidupan masyarakat Kelas Menengahnya

kurang baik dapat diprediksikan bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakatnya tidak dijalankan dengan baik. Hal ini akan lebih ditampakkan pada kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai peningkatan persentase jumlah penduduk miskin, kondisi tersebut akan menjadikan pembentukan Kelas Menengah di Indonesia menjadi semakin kecil. Dari keadaan tersebut dapat diartikan proses demokratisasi di Indonesia akan cenderung menjadi tidak benar. Dari keadaan tersebut dikhawatirkan akan tidak mempunyai kemampuan untuk sangat tipis menyerap, memaknakan, dan mengimplementasikan nilai-nilai universal yang berkembang saat ini secara optimal ke dalam nilai-nilai kehidupan nasional. Hal tersebut akan lebih nyata lagi dengan berbagai kenyataan di mana Kelas Menengah yang ada pada tatanan lokal, daerah, maupun nasional saat ini yang sebenarnya adalah Kelas Menengah yang bersifat "semu" yaitu Kelas Menengah yang dapat disebutkan sebagai "Golongan Kapitalis Karbitan" karena mereka terbentuk dari proses KKN dan atau karena menjadi demikian dengan didongkrak para penguasa sebelumnya.

Keempat, divergensi kelompok negara maju (Amerika, Eropa dan Jepang) dalam forum multilateral (General Trade on Tariffs and Trade/GATT maupun World Organization/WTO) hendaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai media mengembangkan sektor industri yang hingga kini berbasis sumber daya alam searah pengembangan industri hilir untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih baik.

Kelima, Regionalisme dalam forum ASEAN maupun APEC kiranya dapat dijadikan jembatan (*stepping stone*) untuk menyerap berbagai nilai globalisasi (*global creation*), sehingga ikatan regionalisme yang selama ini menjadi hambatan dalam forum regional tersebut, sehubungan dengan kondisinya yang lebih menonjolkan

penerapan nilai-nilai regionalnya akan mengarah pada keadaan yang lebih menjadikan nilai-nilai Regional sebagai benteng masuknya nilai-nilai globalisasi.

Sistem nilai bangsa pada hakikatnya merupakan gambaran atau konsep sikap dan atau pola hidup individu maupun kelompok dalam tata kehidupan bangsanya, dalam sistem nilai tersebut berkembang berbagai cita, cipta, rasa dan karsa seluruh warga masyarakat bangsa yang bersangkutan sehingga dengan masuknya nilai-nilai ekstrinsik akan menjadikan sistem nilai bangsa terganggu, terlebih bila ada penetrasi sistem nilai ekstrinsik yang terkandung dalam makna globalisasi.

Berbagai proses penetrasi yang dilakukan oleh sistem nilai global terjadi dalam bentuk pelembagaan budaya korporat ke dalam tata nilai kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai tersebut pada hakikatnya terikat dengan ruang dan waktu yang dipengaruhi kultur dan atau bentuk budaya tertentu. Oleh karena itu benturan sistem nilai globalisasi dengan sistem nilai yang sudah melekat pada tata kehidupan suatu masyarakat bangsa biasanya terjadi karena adanya sinergi yang positif atau negatif yang berlebihan. Untuk hal tersebut kiranya terhadap berbagai sistem nilai global yang menghasilkan sinergi positif hendaknya dapat diterima dan dikembangkan secara lebih lanjut, sedangkan terhadap nilai-nilai yang bersifat negatif perlu ditolak dengan berbagai upaya dan cara.

Sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia saat ini sebenarnya terdiri dari sistem "Nilai Intrinsik" atau yang biasa disebut nilai dasar dan "Nilai Ekstrinsik" yang merupakan nilai-nilai datang dan diperoleh dari proses globalisasi, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam sistem nilai intrinsik biasanya terkandung bermacam kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, filsafah dan ideologi nasional, sedangkan nilai-nilai yang

berasal dari proses globalisasi membawa berbagai sistem nilai baru yang cenderung merubah pola pikir, pola sikap, tatanan budaya, dan atau perilaku dalam nilai-nilai suatu bangsa. Dalam hal ini kiranya terhadap berbagai perubahan yang mengarah pada arah yang positif hendaknya dapat kontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan maupun tujuan nasional bangsa Indonesia, sedangkan terhadap formulasi nilai-nilai ekstrinsik yang masuk hendaknya dapat dinilai, diwaspadai, dan disaring secara cermat dan arif.

Kebijakan dalam Antisipasi ke depan

Kebijakan dan strategi dalam upaya menangkal, mencegah dan menerima berbagai pengaruh yang terkandung pada nilai-nilai globalisasi dalam proses Pembangunan Nasional dan jatidiri bangsa, perlu ditentukan alternatif pilihan untuk menanggapi dan menyaring hal tersebut, antara lain dilakukan sebagai berikut :

Pertama, Menciptakan, membentuk, dan memberikan gelombang pemukul yang dapat dijadikan penghambat masuknya berbagai nilai-nilai globalisasi yang mengancam kehidupan bangsa, namun pilihan ini mengandung suatu resiko yang cukup besar berupa rasa nasionalisme yang berlebihan.

Kedua, menyesuaikan kelangsungan hidup bangsa dengan nilai-nilai global secara realistik, namun alternatif pilihan ini harus diantisipasi secara cermat karena dapat dimungkinkan dapat menjadi bangsa yang mudah menyerah terhadap adanya penetrasi nilai-nilai global ke dalam nilai-nilai Bangsa.

Ketiga, menyerap sistem nilai ekstrinsik yang positif dan menolak nilai-nilai yang negatif dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai instrinsik bangsa, alternatif ini akan terasa lebih mudah dilakukan, dalam upaya mempertahankan kepribadian bangsa maupun pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

Untuk menghadapi perkembangan global

saat ini kiranya perlu diwujudkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila maupun Undang Undang Dasar 1945 dengan bentuk materi yang nyata dan yang dapat dikaitkan dengan “Wawasan Nusantara” serta “Ketahanan Nasional” terhadap nilai-nilai intrinsik yang perlu dipertahankan maupun nilai-nilai ekstrinsik yang cocok untuk diserap hendaknya dapat dioperasionalkan sebagai landasan pembangunan nasional.

Dalam hal ini inti muatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang berisikan berbagai upaya dan daya untuk mampu mewujudkan kondisi, situasi, maupun potensi persatuan dan kesatuan bangsa dalam tata kehidupan nasional hendaknya dapat bersifat serba kebhinnekaan, untuk hal tersebut

kiranya perlu dipertimbangkan agar berbagai prinsip dasar yang terkandung dalam konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dapat dijadikan materi amandemen UUD 1945 di samping itu juga dapat diformulasikan sebagai suatu wacana Pembangunan Nasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk memformulasikan nilai-nilai global ke dalam norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Indonesia adalah dengan cara menjadikan nilai-nilai ekstrinsik yang bersifat mendasar dapat dijadikan landasan dalam kehidupan nasional (“Idealisme Nasional”).



P.T. Bhara Induk

Jalan KH. Hasyim Ashari No. 36 B Jakarta Pusat
Telp. : 63112241, 6322355
Fax: 6326322

Mengucapkan :

Selamat

“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tahun 2001 ”